

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Nilai-Nilai Multikulturalisme yang terkandung dalam Pemikiran H.A.R.**

##### **Tilaar**

##### **1. Biografi dan Hasil Karya H.A.R. Tilaar**

Untuk mengetahui dunia pemikiran seorang pakar maka perlu mengetahui pula latar belakang kehidupan dan karyanya. Hal ini sangat berarti karena secara tidak langsung ada keterkaitan antara dunia seseorang dengan dunia pemikirannya. (H.A.R. Tilaar, 2009: 362-363)

H.A.R. Tilaar bernama asli Henry Alexis Rudolf. Lahir di Tondano Sulawesi Utara pada tanggal 16 Juni 1932. Terlahir dari latar belakang orangtua yang berprofesi sebagai guru. Maka tidak heran jika sejak kecil Tilaar sudah dibiasakan untuk membaca buku dan menggemari berbagai macam ilmu pengetahuan. Dalam perjalannya menjadi seorang pakar pendidikan, Tilaar mengawali pendidikan dasarnya di Sekolah Rakyat di masa Kolonial. Pendidikan Louwerierschool di Tomohon selesai pada tahun 1946. Kemudian melanjutkan studinya pada jenjang Chr. Normalschool di Tomohon selesai pada tahun 1950. Selanjutnya pada tahun yang sama Tilaar melanjutkan pada sekolah Kweekschool dan tamat pada tahun 1952.

Tilaar kemudian merantau ke Jawa dan melanjutkan pendidikan B-I dan B-II ilmu pendidikan di Bandung pada tahun 1952-1959. Pada tahun

1961 Tilaar kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Indonesia Jakarta dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan dengan prestasi *cumlaude*. Di tanah Jawa saat menempuh studi inilah Tilaar kemudian menikah dengan Martha Tilaar yang kini dikenal sebagai salah satu pengusaha kosmetik besar di Indonesia.

Tidak puas menempuh pendidikan di dalam negeri, Tilaar kemudian mendapat beasiswa dari US-AID untuk belajar di *University of Chicago* pada tahun 1964-1965. Kemudian di *Indiana University Blomington, Indiana* dan menyelesaikan studinya dengan gelar *Master of Science of Educations* atau dengan gelar M.Sc.Ed, pada tahun 1966-1967. Studinya kemudian berlanjut pada tahun 1969 untuk memperoleh gelar *Doctor of education* di *Indiana University* juga.

Sebagai seorang pakar pendidikan H.A.R. Tilaar banyak melibatkan diri dalam berbagai pemikiran mendasar tentang pendidikan melalui gagasan pendidikan sebagai proses pebudayaan dan pembebasan manusia dari horizon status quo dan ideologi-ideologi sempit yang dinilainya memberi warna kelam bagi bangsa Indonesia. Tugas pendidikan dinilainya sebagai tugas sejarah dan kultural adalah upaya untuk menguak tabir situasi dehumanis dan mengubahnya menjadi situasi humanis yang memerdekakan manusia.

H.A.R. Tilaar mengawali kariernya sebagai seorang guru pada tahun 1952 dan kemudian mengajukan pensiun dini pada tahun 1997. Dalam karier sebagai pendidik, H.A.R Tilaar menjadi guru sekolah rakyat

hingga menjadi Guru Besar di beberapa Universitas di Indonesia. Selain menjadi pendidik, pengabdian Tilaar pada dunia pendidikan juga terlihat dalam keterlibatannya dalam berbagai organisasi seperti menjadi anggota dewan penasehat Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI). Menjadi anggota Ikatan Sarjana dan Pengembangan Ilmu Sosial (ISPSI). Menjadi anggota Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) dan anggota Assosiasi Dosen Indonesia.

Adapun riwayat pekerjaan H.A.R. Tilaar dalam dunia akademik adalah sebagai Direktur Utama LPMP IKIP Jakarta (sekarang UNJ). Guru Besar pada Universitas Indonesia. Guru Besar Emeritus pada IKIP Jakarta (UNJ). Guru Besar Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta dan pernah menjadi Dekan Pascasarjana IKIP Jakarta (1976-1980). Sementara dalam birokrasi pemerintahan H.A.R. Tilaar pernah menjadi staff Ahli Badan Perencanaan pembangunan Nasional (BAPPENAS) pada tahun 1970-1974. Karo Kesra, Sosial dan Perumahan Rakyat (BAPPENAS) tahun 1974-1984. Kepala Biro Pendidikan dan Kebudayaan BAPPENAS 1984-1991 dan Asisten Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, bidang sumber daya manusia tahun 1993-1996. Selain itu Tilaar juga Menjadi Dewan Penyantun ASMI Jakarta tahun 1995-2000. Ketua Dewan Penyantun Universitas Katolik Atmajaya Jakarta 1996-1999. Anggota dewan pertimbangan buku nasional sejak tahun 1978. Anggota pengurus harian yayasan buku utama Depdikbud sejak tahun 1984. Sebagai konsultan UNDP tahun 1994. Konsultan Bank dunia tahun 1996.

Konsultan ADB 1995-1997 dan anggota dewan riset nasional tahun 1999-2004.

Sosok Tilaar adalah figur cendekiawan yang banyak melibatkan diri dalam berbagai pemikiran yang mendasar tentang pendidikan melalui gagasan pendidikan sebagai proses pembudayaan dan pembebasan manusia dari belenggu status quo dan ideologi-ideologi sempit yang telah membuat kelam bangsa Indonesia. Tugas pendidikan dinilai oleh Tilaar sebagai tugas sejarah dan kultural yang mengelupas belenggu dehumanisasi dan mengubahnya menjadi situasi humanis yang memerdekakan dan mencerahkan manusia. Pandangan ini sejalan dengan Paulo Freire yang menolak setiap upaya dehumanisasi dalam bentuk apapun pada pendidikan. Pendidikan yang memerdekakan menjadi pijakan awal untuk terwujudnya masyarakat madani sebagai masyarakat yang terbuka, egaliter, demokratis dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam arus pemikiran Indonesia H.A.R.Tilaar adalah sosok yang *expert* untuk perencanaan pendidikan ke depan. Tilaar adalah sosok teknokrat pendidikan yang handal. Sebagai orang yang ahli dalam perencanaan kebijakan, Tilaar termasuk tokoh yang menolak pendidikan yang sentralistis. Sebaliknya Tilaar selalu menekankan desentralisasi pendidikan dan otonomi dalam pendidikan nasional agar dapat memberikan ruang bagi perkembangan budaya daerah sehingga dapat memberi warna cerah pada pendidikan nasional.

Membaca karya-karya Tilaar dapat diketahui pemikirannya lebih mendalam yang membahas semua segi dalam bidang pendidikan, mulai dari segi sejarah dan teori pendidikan, analisis kebijakan, sampai dengan tawaran baru pendidikan nasional. Selain itu sebagai seorang guru yang berdedikasi tinggi, Tilaar selalu mengajarkan pada generasi muda untuk selalu kreatif, mandiri dan berpikir kritis. Hal ini menjadi cakrawala yang hidup dalam ruang gerak batin semua orang untuk terus merefleksi, berkreasi dan kritis dalam proses perubahan yang terus bergerak maju.

H.A.R. Tilaar selalu menekankan bahwa fungsi pendidikan terutama di sekolah-sekolah negeri adalah untuk membangun karakter bangsa dan sekaligus memberikan ruang bagi tumbuhnya masyarakat yang majemuk. Dalam konteks ini maka perlu dicarikan wadah yang pas bagi sekolah-sekolah swasta di antara sekolah-sekolah negeri yang harus mengatasi semua golongan.

Adapun karya-karya Tilaar yang dipublikasikan sebagian di antaranya adalah sebagai berikut (H.A.R. Tilaar, 2009: 362-363):

- a. *Pendidikan dan Pembangunan Nasional menyongsong Abad XXI*: Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- b. *Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan*: Remaja Rosda Karya, Bandung, 1992.
- c. *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993 (ditulis bersama Dr. Ace Suryadi).

- d. *Lima Puluh Tahun Pembangunan Nasional (1945-1995)*, Gramedia, Jakarta, 1995.
- e. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi: Visi Misi Dan Program Aksi Pendidikan Dan Pelatihan Menuju 2020*, Gramedia, Jakarta, 1997.
- f. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad XXI*, Indonesia Tera, Magelang, 1998.
- g. *Pendidikan, Kebudayaan Dan Masyarakat Madani Indonesia*: Remaja Rosda Karya, Bandung 1999.
- h. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000.
- i. *Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia*: Yayasan Hak Asasi manusia, Demokrasi Dan Supremasi Hukum (YHDS), Jakarta, 2001.
- j. *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta, Rineka cipta, 2002.
- k. *Perubahan Sosial Dan Pendidikan, Pengantar Pedagogik Transformatif Untuk Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2002.
- l. *Kekuasaan Dan Pendidikan, Suatu Tinjauan Dari Perspektif Studi Kultural*, Indonesia Tera, Magelang, 2003.

Adapun karya lain berupa artikel yang dipublikasikan sebagian di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. "Kajian Kritis Sistem Pendidikan Nasional", makalah yang disampaikan pada Seminar nasional dengan tema: mencari paradigma baru pendidikan nasional memasuki millenium III, diselenggarakan

oleh ISPS dan PRIMAGAMA dalam rangka menyambut HUT PGRI di Yogyakarta 9 November 1999.

- b. “Inovasi Pendidikan Kita Tidak Jalan”, dalam majalah Gerbang edisi 2 Tahun I, September-Oktober 2001.
- c. “UU SPN, Memperkosakan Pluralisme Masyarakat Indonesia”, dalam majalah Bahana edisi XXXVI Mei 2003.
- d. “Globalisasi Dan Tantangan Untuk Reformasi Pendidikan Nasional”, dalam Ki Supriyoko, mengurai benang kusut pendidikan, gagasan para pakar pendidikan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Tentu masih banyak lagi karya Tilaar dalam bentuk artikel di berbagai media massa di Indonesia. Jiwa nasionalis Tilaar jelas terpancar dari karya-karyanya yang tidak hanya merenungkan kondisi bangsa Indonesia, namun juga memikirkan upaya perbaikan bagi pendidikan Indonesia menuju masa depan bangsa dan negara yang gemilang. Bahkan sebagai dewan riset nasional (1999-2004), reputasinya juga diakui oleh dunia internasional, maka biografinya juga terdapat dalam 1000 *Greet Asians (international Biographical Centre)*. Selain itu biografi beliau juga tercatat dalam *Who's Who in The World Millenium Edition*. Sebagai orang yang berdedikasi tinggi terhadap dunia pendidikan Indonesia pada tahun 1998 Tilaar dianugrahi Bintang Jasa Utama Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diperolehnya atas sekian banyak waktu dan perhatian yang telah dicurahkan demi perbaikan-perbaikan pendidikan Indonesia menuju tercapainya cita-cita menuju Indonesia baru.

## 2. Pemahaman tentang Nilai

Lorens Bagus (2002) dalam bukunya Kamus Filsafat menjelaskan tentang nilai yaitu sebagai berikut:

- a) Nilai dalam bahasa Inggris *value*, bahasa Latin *valere* (berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, kuat).
- b) Nilai ditinjau dari segi harkat adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, atau dapat menjadi objek kepentingan.
- c) Nilai ditinjau dari segi keistimewaan adalah apa yang dihargai, dinilai tinggi atau dihargai sebagai sesuatu kebaikan. Lawan dari suatu nilai positif adalah “tidak bernilai” atau “nilai negatif”. Baik akan menjadi suatu nilai dan lawannya (jelek, buruk) akan menjadi suatu “nilai negatif” atau “tidak bernilai”.
- d) Nilai ditinjau dari sudut Ilmu Ekonomi yang bergelut dengan kegunaan dan nilai tukar benda-benda material, pertama kali menggunakan secara umum kata nilai.

Beberapa pengertian yang lainnya tentang nilai dari para ahli dikemukakan Rohmat Mulyana (2004) dalam bukunya yang berjudul “Mengartikulasikan Pendidikan Nilai”, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a) Nilai adalah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya, Gordon Allfort (1964). Definisi ini dilandasi oleh pendekatan psikologis, karena itu tindakan dan perbuatannya seperti keputusan benar-salah, baik-buruk, indah-tidak indah, adalah hasil



proses psikologis. Termasuk kedalam wilayah ini seperti hasrat, sikap, keinginan, kebutuhan dan motif.

- b) Nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternatif (Kuperman, 1983). Penekanan utama definisi ini pada faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku manusia. Pendekatan yang melandasi definisi ini adalah pendekatan sosiologis. Penegakan norma sebagai tekanan utama dan terpenting dalam kehidupan sosial akan membuat seseorang menjadi tenang dan membebaskan dirinya dari tuduhan yang tidak baik.
- c) Nilai adalah konsepsi (tersurat atau tersirat, yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi tindakan pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir (Kluckhohn, Brameld, 1957).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dikemukakan kembali bahwa nilai itu adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Sejalan dengan definisi itu maka yang dimaksud dengan hakikat dan makna nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang. Nilai bersifat abstrak, berada dibalik fakta, memunculkan tindakan, terdapat dalam moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis, dan berkembang kearah yang lebih kompleks.

Kattsoff dalam bukunya Soejono Soemargono (2004: 323) mengatakan bahwa hakekat nilai dapat dijawab dengan tiga macam cara: *Pertama*, nilai sepenuhnya berhakekat subyektif, tergantung kepada pengalaman manusia pemberi nilai itu sendiri. *Kedua*, nilai merupakan kenyataan-kenyataan ditinjau dari segi ontologi, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi logis dan dapat diketahui melalui akal. *Ketiga*, nilai-nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan.

### **3. Toleransi, Respek, Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia, dan Menghargai Perbedaan dalam Pemikiran H.A.R. Tilaar**

#### **a. Toleransi**

Toleransi merupakan sikap dan perbuatan yang melarang adanya sikap diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Multikulturalisme merupakan konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, etnis dan agama. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam atau multikultur.

Pemikiran multikulturalisme H.A.R. Tilaar berprinsip bahwa Pendidikan pada hakikatnya adalah pembudayaan nilai-nilai, sehingga

di sinilah studi kultural perlu disimak dalam rangka menghadapi krisis masyarakat serta mencari jalan pemecahannya (H.A.R. Tilaar, 2009: 83). Pembudayaan nilai-nilai berarti menanamkan sikap toleran dalam menghadapi pluralitas bangsa Indonesia. Dengan kata lain, pemikiran H.A.R. Tilaar mengenai nilai-nilai multikulturalisme dalam pendidikan adalah pendidikan yang menekankan pada proses penanaman sikap menghormati dan toleran terhadap keberagaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural.

Proses Pendidikan merupakan proses pembudayaan yang terjadi dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, yang diarahkan menuju terciptanya suatu masyarakat madani global yang berbasis masyarakat madani Indonesia dengan ciri khas kebudayaan nasional Indonesia yang berbhinneka (H.A.R. Tilaar, 2000: 11). Pemikiran H.A.R. Tilaar tersebut menunjukkan bahwa proses pembudayaan yang terjadi dalam interaksi antar manusia mengandung nilai toleransi agar tercipta masyarakat madani yang memiliki ciri khas kebudayaan yang beraneka ragam. Dengan adanya sikap toleransi maka interaksi antar manusia akan terjalin dengan baik dan tidak memunculkan konflik.

Menurut H.A.R. Tilaar (2003: 171), nilai-nilai yang terkandung dalam multikulturalisme memiliki enam tujuan, yaitu: *pertama*, mengembangkan perspektif sejarah (*ethnohistorisitas*) yang beragam dari kelompok-kelompok masyarakat. *Kedua*, memperkuat kesadaran

budaya yang hidup di masyarakat. *Ketiga*, memperkuat kompetensi interkultural dari budaya-budaya yang hidup di masyarakat. *Keempat*, membasmi rasisme, seksisme, dan berbagai jenis prasangka (*prejudice*). *Kelima*, mengembangkan kesadaran atas kepemilikan planet bumi. *Keenam*, mengembangkan keterampilan aksi sosial (*social action*).

Pemikiran H.A.R. Tilaar tersebut menunjukkan bahwa tujuan yang terkandung dalam nilai-nilai multikulturalisme merupakan wujud dari sikap toleransi. Setiap orang yang sadar akan budaya yang hidup dalam masyarakat menunjukkan bahwa toleransi merupakan sikap dasar yang dapat mewujudkan sikap sadar akan budaya dalam masyarakat. Selain itu, menghilangkan sikap rasisme, seksisme, dan berbagai jenis prasangka hanya akan tercipta jika masing-masing individu memiliki sikap toleran.

Mengenai fokus pendidikan multikultur, Tilaar mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultur, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural domain atau *mainstream*. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya *mainstream* yang dominan, yang pada akhirnya menyebabkan orang-orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat *mainstream*. Pendidikan multikultur sebenarnya merupakan sikap "peduli" dan mau mengerti akan

perbedaan (*accepted difference*), atau "*politics of recognition*" politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.

Pemikiran H.A.R. Tilaar tersebut menunjukkan pentingnya sikap toleran dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang memiliki ciri khas kebhinnekaan. Adanya sikap toleran atau menghormati budaya lain merupakan sikap yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat multikultural yang harmonis.

#### **b. Respek**

Respek merupakan kepekaan atau kesadaran untuk saling mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya yang dibalut semangat kerukunan dan perdamaian.

Pandangan H.A.R. Tilaar mengenai pendidikan multikultural berpijak pada kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara yang multi etnik dan budaya. Maka multikulturalisme merupakan wacana para akademisi maupun praktisi dalam berbagai bidang kehidupan di Indonesia (Tilaar, 2003: 162). Realitas bangsa Indonesia yang multikultural dan berhadapan dengan berbagai masalah dalam reformasi saat ini maka terlihat adanya kebutuhan mendesak untuk mendekonstruksi kembali kebudayaan nasional Indonesia yang dapat menjadi *integrating force* yang mengikat seluruh keragaman etnis dan budaya bangsa.

Menurut Tilaar (2003: 167), gagasan multikulturalisme bukan hanya suatu yang abstrak tetapi pengembangan suatu pola tingkah laku

yang hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan. Selain itu multikulturalisme tidak akan berhenti pada pengakuan akan identitas suatu kelompok masyarakat atau suku, tetapi juga ditujukan kepada terwujudnya integrasi nasional budaya yang beraneka ragam. Gagasan pendidikan multikultural merupakan sesuatu yang baru di Indonesia. Sikap respek sangat dibutuhkan karena kenyataan kultural dan pengembangan terakhir kondisi sosial, politik dan budaya di era reformasi yang penuh dengan gejolak dan rawan konflik, kekerasan dan perpecahan di masyarakat.

Pemikiran multikulturalisme H.A.R. Tilaar memberi pelajaran untuk memiliki apresiasi dan respek terhadap budaya dan agama-agama orang lain. Atas dasar ini maka penerapan multikulturalisme menuntut kesadaran dari masing-masing budaya lokal untuk saling mengakui dan menghormati keanekaragaman identitas budaya yang dibalut semangat kerukunan dan perdamaian. Diharapkan dengan kesadaran dan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan, pluralitas bangsa, baik dalam etnis, agama, budaya hingga orientasi politik, akan bisa mereduksi berbagai potensi yang dapat memicu konflik sosial di kemudian hari.

### **c. Penghormatan Terhadap Hak Asasi Manusia**

Indonesia merupakan negara yang multikultur. Budaya yang dimiliki masing-masing warga negara merupakan hak asasi bagi pemilik budaya tersebut. Indonesia merupakan negara yang menjunjung

tinggi demokrasi dan penghormatan terhadap HAM. Oleh sebab itu, penghormatan terhadap HAM merupakan salah satu wujud penerapan nilai-nilai dalam pendidikan multikultural. Hal ini sesuai dengan pemikiran Tilaar yang menyatakan bahwa Pendidikan multikultural dapat dirumuskan sebagai wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural, hak-hak asasi manusia serta pengurangan atau penghapusan berbagai jenis prasangka atau *prejudice* untuk membangun suatu kehidupan masyarakat yang adil H.A.R. Tilaar (2003: 174). Pemikiran Tilaar tersebut menunjukkan pentingnya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Penghormatan terhadap hak asasi manusia harus diimbangi dengan penghapusan berbagai jenis prasangka. Menghormati budaya lain dengan menghilangkan berbagai prasangka berarti menghormati hak asasi manusia. Kenyataan masyarakat yang ada di Indonesia terdiri dari berbagai budaya yang berbeda sehingga budaya yang dimiliki masing-masing individu merupakan hak asasi bagi individu tersebut.

Menurut Tilaar (2003: 164), pendidikan multikultur berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang "interkulturalisme" seusai perang dunia II. Kemunculan gagasan dan kesadaran "interkulturalisme" ini selain terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut HAM, kemerdekaan dari kolonialisme, dan diskriminasi rasial dan lain-lain, juga karena meningkatnya pluralitas di negara-negara Barat sendiri sebagai akibat dari peningkatan migrasi dari negara-negara baru merdeka ke Amerika dan Eropa.

#### **d. Menghargai Perbedaan**

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam budaya. Masing-masing budaya memiliki ciri khas yang berbeda satu sama lain. Pemikiran Tilaar menunjukkan bahwa sikap menghargai perbedaan sudah ada sejak zaman dahulu. Menurut Tilaar (2003: 165) di Indonesia sebenarnya sejak kebangkitan nasional telah menunjukkan upaya membangun masyarakat dan bangsa Indonesia berdasarkan kesetaraan kultural. Seperti dapat dilihat pada lahirnya gerakan Budi Utomo yang didasarkan pada kebudayaan, perkumpulan-perkumpulan Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes dan sebagainya menunjukkan kebhinnekaan dari masyarakat Indonesia. Selanjutnya ikatan-ikatan yang didasarkan pada identitas suku ini disatukan dalam Sumpah Pemuda yang bertujuan membangun satu kebudayaan bangsa Indonesia. Proses ini terus berlanjut hingga Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia 1945, wacana multikulturalisme muncul pula dalam penyusunan pembukaan UUD 1945. Pandangan multikulturalisme juga tergambar di dalam Amandemen UUD 1945 melalui TAP MPR Tahun 2002 yang menyatakan bahwa seluruh Pembukaan UUD 1945 diterima tanpa amandemen.

Menurut H.A.R. Tilaar (2003: 4), multikulturalisme adalah suatu paham atau situasi masyarakat yang tersusun dari banyak kebudayaan. Ada tiga hal yang mendorong berkembang pesatnya pemikiran multikulturalisme yaitu tumbuhnya kesadaran penghargaan terhadap



HAM, perkembangan globalisasi yang mempengaruhi perubahan cara berfikir, pengelompokan masyarakat, pengaruh ideologi baru, dan demokratisasi, yaitu pengakuan dan penghargaan terhadap keragaman dan perbedaan.

Kemampuan untuk menghormati keragaman dan perbedaan di negara Indonesia yang plural menjadi keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar dan harus dimiliki oleh setiap warga negaranya, jika bangsa dan negara ini ingin tetap eksis. Untuk menumbuhkan kemampuan tersebut, jalur pendidikan merupakan media yang sangat strategis. Melalui jalur ini, pendidikan multikultural merupakan tema yang harus diangkat untuk menumbuhkan kemampuan untuk menghormati keragaman. Khususnya dalam pendidikan formal, tema-tema yang terkait dengan pendidikan multikultural dapat dimasukkan ke dalam proses pembelajaran baik melalui kegiatan akademik yang terintegrasi ke dalam beberapa mata pelajaran maupun kegiatan non-akademik. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dari berbagai ragam kelompok suku, etnis, budaya, bahasa, agama dan lain-lain. Dengan keragaman tersebut maka bangsa Indonesia dapat dikatakan sebagai bangsa yang mempunyai "multikultural".

Konsep multikulturalisme mempunyai relevansi makna dan fungsi yang tepat serta penting untuk dikembangkan dan diinternalisasikan dalam proses transformasi nilai-nilai masyarakat dan bangsa yang beragam. Sebab prinsip-prinsip dasar multikulturalisme

mengakui dan menghargai keberagaman kelompok masyarakat seperti etnis, ras, budaya, gender, strata sosial, agama, perbedaan kepentingan, keinginan, visi, keyakinan dan tradisi yang akan sangat membantu bagi terwujudnya perubahan format perilaku sosial yang kondusif dan sangat menjanjikan ditengah kehidupan masyarakat dan bangsa yang majemuk.

Adapun nilai-nilai yang ada di dalam pendidikan multikultural dan menjadi nilai inti dan tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Apresiasi terhadap adanya kenyataan pluralitas budaya dalam masyarakat
- b. Pengakuan terhadap harkat dan hak asasi manusia
- c. Pengembangan tanggungjawab masyarakat dunia
- d. Pengembangan tanggungjawab manusia terhadap bumi atau alam semesta.

Sementara tujuan yang hendak dicapai dari pendidikan multikultural adalah sebagai berikut:

- a. Mengembangkan perspektif sejarah yang beragam dari kelompok-kelompok masyarakat
- b. Memperkuat kesadaran budaya yang hidup di masyarakat
- c. Memperkuat kompetensi interkultural dari budaya-budaya yang hidup di masyarakat
- d. Membasmi rasisme, seksisme dan berbagai jenis prasangka

- e. Mengembangkan kesadaran atas kepemilikan bumi dan alam semesta
- f. Mengembangkan ketrampilan aksi social

Dari pemaparan tersebut terlihat suatu konsep dasar yang terintegrasi dan meliputi tujuan-tujuan yang sangat komprehensif.

## **B. Pengaruh Pemikiran H.A.R. Tilaar terhadap Pendidikan Kewarganegaraan**

### **1. Pendidikan Multikultural**

Kemajemukan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain menjadi modal sosial dengan konstruksi berbasis kearifan lokal. Heterogenitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab harus dijaga dan dilestarikan sebagai khasanah budaya nasional. Dalam konteks hubungan sosial baik secara horizontal maupun vertikal dalam realita pluralitas, dibutuhkan instrumen Pendidikan yang berkarakter terbuka, inklusif, toleran dan pluralis.

Pendidikan dan masyarakat multikultural memiliki hubungan timbal balik (*reciprocal relationship*). Artinya, bila pada satu sisi pendidikan memiliki peran signifikan guna membangun masyarakat multikultural, disisi lain masyarakat multikultural dengan segala karakternya memiliki potensi signifikan untuk mensukseskan fungsi dan peran pendidikan, itu berarti penguatan disatu sisi, langsung atau tidak langsung, akan memberi penguatan pada sisi lain.

Pemikiran H.A.R. Tilaar berpijak pada asumsi bahwa pada dasarnya masyarakat, pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu tripartit tunggal. Kebudayaan merupakan dasarnya, sementara masyarakat sebagai penyedia berbagai sarana dan pendidikan merupakan kegiatan untuk melestarikan serta mengembangkan nilai-nilai yang mengikat kehidupan bersama dalam masyarakat, di sisi lain masyarakat adalah pemilik dari kebudayaan itu (H.A.R. Tilaar, 2003: 164).

H.A.R. Tilaar juga menyatakan bahwa antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat dalam arti keduanya berkenaan dengan suatu hal yang sama ialah nilai-nilai. Di dalam rumusan-rumusan mengenai kebudayaan telah menjalin ketiga pengertian yaitu manusia, masyarakat, dan budaya sebagai tiga dimensi dari hal yang bersamaan. Oleh sebab itu, pendidikan tidak dapat terlepas dari kebudayaan dan hanya dapat terlaksana dalam suatu masyarakat. Apabila kebudayaan memiliki tiga unsur penting yaitu kebudayaan sebagai suatu tata kehidupan (*order*), kebudayaan sebagai suatu proses, dan kebudayaan yang mempunyai visi tertentu (*goals*), maka pendidikan dalam rumusan tersebut adalah sebenarnya proses pembudayaan. Dengan demikian tidak ada suatu proses pendidikan tanpa kebudayaan dan tanpa masyarakat, dan sebaliknya tidak ada suatu kebudayaan dan tanpa masyarakat, dan sebaliknya tidak ada suatu kebudayaan dalam pengertian suatu proses tanpa pendidikan, dan proses kebudayaan dan pendidikan hanya dapat

terjadi di dalam hubungan antarmanusia di dalam suatu masyarakat tertentu. (H.A.R. Tilaar, 2000; 7-8).

Pandangan multikulturalisme untuk Indonesia memang baru dimulai. Bahkan otonomi daerahpun baru saja bergulir tentu diperlukan waktu dan persiapan yang cukup untuk memperoleh suatu bentuk yang pas dan pendekatan yang cocok untuk pendidikan multikultural bagi Indonesia (Tilaar, 2003:167).

H.A.R. Tilaar (2003: 170), di dalam merumuskan gagasan mengenai konsep dasar pendidikan multikultural, terlebih dahulu mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan multikultural. Menurutnya ada dua masalah yang berkaitan yaitu :

- a. Pendidikan multikultural merupakan suatu proses. Artinya konsep pendidikan multikultural bagi Indonesia memerlukan perumusan, refleksi dan tindakan lapangan sesuai dengan perkembangan konsep-konsep yang fundamental mengenai pendidikan dan hak asasi manusia.
- b. Pendidikan multikultural merupakan sesuatu yang multifaset, oleh sebab itu memerlukan pendekatan lintas disiplin, maupun dari para pakar dan praktisi pendidikan untuk semakin lama semakin memperhalus dan mempertajam konsep pendidikan multikultural yang dibutuhkan masyarakat Indonesia.

Berkaitan dengan poin pertama mengenai proses perumusan, refleksi dan tindakan mengenai pendidikan multikultural, menurut H.A.R. Tilaar ada beberapa permasalahan medasar yang perlu menjadi pertimbangan

antara lain *pertama*, perlu adanya suatu konsep yang jelas mengenai kebudayaan, misalnya apa yang dimaksud dengan kebudayaan nasional yang sebenarnya. *Kedua*, apakah peranan pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan moral atau agama dalam membentuk identitas budaya dan identitas bangsa Indonesia. *Ketiga*, bagaimanakah hakikat pluralisme yang berarti pengakuan terhadap kelompok-kelompok minoritas di masyarakat. *Keempat*, bagaimanakah hak orangtua dalam menentukan pendidikan bagi anaknya? *Kelima*, adalah nilai-nilai manakah yang akan dipertimbangkan dalam masyarakat mejemuk. Beberapa poin pertimbangan tersebut menunjukkan betapa rumit dan banyaknya permasalahan yang ditimbulkan dalam pendidikan multikultural.

Menurut Tilaar (2003:172) di dalam merumuskan pendidikan multikultural diperlukan penjabaran dari konsep dasar tersebut melalui jenis kegiatan yaitu:

*Pertama*, reformasi kurikulum, yaitu diperlukan suatu teori kurikulum yang baru antara lain yang berisi analisis historis yang termasuk di dalamnya analisis buku-buku pelajaran yang tidak sesuai dengan pluralisme budaya.

*Kedua*, mengajarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Dalam hal ini diperlukan aksi-aksi atau *sosial action* untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan ras, baik di dalam budaya-budaya tingkat tinggi maupun di dalam budaya populer dengan melihat struktur demokrasi masyarakat.

*Ketiga*, mengembangkan potensi multikultural. Hal ini meliputi pengembangan identitas etnis dan sub etnis melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan. Demikian pula, memberantas berbagai jenis prasangka yang buruk dan menjauhkan nilai-nilai negatif dari suatu kelompok etnis.

*Keempat*, melaksanakan pedagogik kesetaraan yang dilaksanakan di sekolah misalnya di dalam cara mengajar dan belajar yang tidak menyinggung perasaan atau tradisi dalam suatu kelompok tertentu. Demikian pula praktik-praktik dalam budaya sekolah yang membedakan antara perempuan dan laki-laki.

Kemajemukan bangsa Indonesia yang ditandai dengan beragamnya budaya, dari sisi positif menjadikan Indonesia kaya, namun dari sisi negatif kemajemukan yang ditandai dengan perbedaan-perbedaan baik budaya, agama, bahasa, karakter, serta adat istiadat dapat menjadi penyebab munculnya perselisihan atau konflik yang mengatasnamakan suku, agama, ras, atau golongan masing-masing. Oleh karena itu perlu sebuah metode atau perlakuan khusus terhadap perbedaan-perbedaan tersebut. Salah satu metode atau cara yang dapat dilakukan adalah dengan menanamkan nilai-nilai toleransi, respek, penghormatan terhadap HAM, dan menghargai perbedaan.

Selain keempat dimensi pendidikan multikultural yang telah disebutkan di atas, H.A.R. Tilaar menambahkan dimensi pemberdayaan budaya sekolah sebagai salah satu dimensi pendidikan multikultural. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dipandang sebagai pintu

gerbang untuk melaksanakan tugas pengembangan budaya bagi peserta didik. Sebagai pintu gerbang, maka sekolah harus memiliki kekuatan strategis untuk menciptakan budaya positif sesuai dengan falsafah masyarakat. Sekolah harus merupakan suatu motor penggerak dalam perubahan struktur masyarakat yang timpang.

H.A.R. Tilaar menyatakan bahwa pendidikan multikultural tidak bertujuan untuk menghilangkan perbedaan akan tetapi menghilangkan prasangka, menimbulkan dialog, mengenal perbedaan sehingga timbul rasa saling menghargai dan mengapresiasi. Dari sini diharapkan akan muncul modal kultural suatu bangsa karena bangsa yang kehilangan modal kultural akan sangat rawan perpecahan. Modal kultural ini lahir dari kekayaan kearifan lokal bangsa yang jika diangkat bisa menjadi kekuatan yang sangat besar. Dalam konteks Indonesia yang dikenal amat majemuk, pendidikan multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa ke depan.

Dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok rasial, agama dan kultural dominan atau *mainstream*. Fokus seperti ini pernah menjadi tekanan pada pendidikan interkultural yang menekankan peningkatan pemahaman dan toleransi individu-individu yang berasal dari kelompok minoritas terhadap budaya *mainstream* yang dominan, yang pada akhirnya dapat membuat orang-



orang dari kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat *mainstream*. Pendidikan interkultural seperti ini pada akhirnya memunculkan tidak hanya sikap tidak peduli (*indifference*) terhadap nilai-nilai budaya minoritas, tetapi bahkan cenderung melestarikan prasangka-prasangka sosial dan kultural yang rasis dan diskriminatif. Dan dari kerangka inilah, maka pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti, atau “*politics of recognition*”, politik pengakuan terhadap orang-orang dari kelompok minoritas.

Reformasi kurikulum dalam pendidikan multikultural menurut Tilaar (2003:180) dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemilihan mata pelajaran yang akan diajarkan
2. Merumuskan mengenai tujuan interaksional yang akan dicapai dengan mata pelajaran tersebut
3. Sumber-sumber apa yang diperlukan
4. Rencana evaluasi dari mata pelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik

Dalam keputusan interaksional meliputi persiapan peserta didik untuk menyerap mata pelajaran misalnya di dalam membangkitkan perhatian peserta didik, diagnosis proses pembelajaran dan hubungan-hubungannya atau kesinambungannya dengan mata pelajaran yang disajikan. Demikian pula cara-cara penyampaian pelajaran, yaitu informasi apa yang akan diberikan, contoh-contoh apa yang perlu disajikan dan mengecek kembali pengertian yang diharapkan diperoleh oleh peserta

didik. Keputusan interaksional juga meliputi petunjuk-petunjuk praktis dalam pelaksanaannya, begitu pula dengan petunjuk-petunjuk yang khas untuk setiap mata pelajaran yang akan disajikan.

Di dalam penyajian pendidikan multikultural Tilaar (2003: 181) menegaskan sebaiknya tidak diberikan dalam satu mata pelajaran yang terpisah dengan mata pelajaran yang lain, akan tetapi terintegrasi pada mata pelajaran yang relevan seperti mata pelajaran agama atau pendidikan kewarganegaraan yang menjadi wadah untuk menampung program-program multikultural.

Pendidikan multikultural selain disajikan dalam kurikulum yang terintegrasi pada mata pelajaran tertentu, dapat pula disajikan dalam seluruh budaya dan lembaga pendidikan baik dalam keluarga, lingkungan sekolah maupun masyarakat luas (Tilaar, 2003: 181). Dengan demikian pendidikan multikultural lebih tepat disebut sebagai suatu proses pendidikan.

Di sisi lain H.A.R. Tilaar melihat pentingnya otonomi daerah bagi reformasi pendidikan Indonesia. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan pendidikan multikultural sebagai suatu yang sentral, karena pendidikan bukan hanya menjadi tanggungjawab daerah tetapi juga merupakan refleksi dari daerah atau budaya daerah dalam rangka pembinaan dan persatuan nasional (Tilaar, 2003: 182-183)

Tema-tema dasar yang dapat diangkat ke dalam pendidikan multikultural adalah tema yang sesuai dengan filosofis dasar negara Indonesia,

yaitu Pancasila. Tema-tema tersebut misalnya tema tentang agama/ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan/kerakyatan, demokrasi dan keadilan sosial.

#### 1. Tema Keberagamaan/Ketuhanan

Tema keberagamaan/ketuhanan dapat diangkat dalam pendidikan multikultural sebab semua agama yang dijadikan sebagai pandangan hidup oleh pemeluknya menjelaskan tentang keberadaan manusia di dunia, menjelaskan arah dan tujuan hidup manusia dan agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur kehidupan antara sesama manusia dan dengan makhluk Tuhan lainnya.

Dengan demikian agama juga terkait erat dengan aspek-aspek kehidupan masyarakat seperti kekerabatan, kepemimpinan politik, ekonomi dan sebagainya, sehingga agama bersifat operasional dalam kehidupan sosial manusia. Ada keteraturan dan kedisiplinan yang semestinya ditaati oleh manusia dalam melaksanakan kewajibannya sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa.

#### 2. Tema Kemanusiaan

Tema kemanusiaan yang dapat diangkat dalam pendidikan multikultural misalnya manusia di dunia ini tidak hidup sendirian, tetapi dikelilingi oleh masyarakatnya, komunitasnya dan alam sekitarnya dan secara hakiki manusia mempunyai ketergantungan dengan sesamanya, karena itu mereka harus berusaha memelihara hubungan baik dengan sesamanya atas dasar sama rata dan sama rasa, dan oleh sebab itu

mereka harus sedapat mungkin bersifat konform, guyub, berbuat sama dan bersama dengan sesamanya dalam komunitas yang berasas pada jiwa sama tinggi dan sama rendah. Karena itu tema Kemanusiaan; dimaksudkan dapat membentuk sikap peduli dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dengan mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban sesama manusia.

### 3. Tema Persatuan dan Kesatuan

Dalam tema ini diangkat tentang keharusan mengutamakan keutuhan bangsa, yaitu dengan menciptakan kehidupan yang harmonis antar sesama warga bangsa yang mempunyai keragaman budaya dalam rangka mewujudkan bangsa yang bersatu.

### 4. Tema Kerakyatan

Salah satu bentuk budaya masyarakat Indonesia diantaranya adalah budaya musyawarah dan mufakat. Musyawarah mengundang partisipasi yang '*egaliter*' dari semua anggota masyarakat, sekalipun dalam kenyataan akan terdapat variasi pelaksanaan teknisnya. Tema Kerakyatan diharapkan dapat membentuk sikap yang demokratis, terbuka terhadap keragaman, menghargai aspirasi orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dalam mewujudkan masyarakat pluralis yang damai dan bermartabat.

### 5. Tema Keadilan

Pengakuan terhadap pluralitas budaya merupakan suatu keadaran untuk mengurangi batas/sekat-sekat budaya dan itu bisa terwujud

apabila proses transpormasi antar budaya dibangun dengan citra dan cita-cita yang penuh persahabatan dan perdamaian. Tema Keadilan, dimaksudkan dapat membentuk sikap empati terhadap orang lain serta memiliki kepekaan sosial terhadap sesama manusia, merasa sama dan sederajat dalam hubungan sosial dan anti diskriminasi/marjinalisasi.

Tema tersebut sangat sesuai dengan kondisi di Indonesia karena Indonesia merupakan salah satu negara multikultural di dunia. Kebenaran dari pernyataan ini dapat dilihat dari kondisi sosio kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Selain itu, Indonesia termasuk salah satu negara berkembang. Sebagai negara berkembang, Pendidikan merupakan salah satu sarana srtategis dalam upaya membangun jati diri bangsa. Sarana terbaik dan strategis yang digunakan untuk membangun dan mensosialisasikan konsep multikulturalisme agar melahirkan perilaku sosial kondusif, kearifan sosial, kearifan budaya dan kearifan moral atau akhlak adalah melalui Pendidikan multikultural.

Pendidikan multikultural diaplikasikan dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan kultural yang ada pada para siswa seperti perbedaan etnis, agama, baha, gender, kelas sosial, ras, kemampuan, dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Pendidikan multikultural juga melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis, dan pluralis dalam lingkungan mereka. Melalui pendidikan multikultural, akan membantu siswa mengerti,

menerima dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya dan nilai kepribadian. Melalui penanaman semangat nilai-nilai multikulturalisme, akan menjadi medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai.

Menurut H.A.R. Tilaar, 2003 (dalam Muhammad Isnaini) multikultural menawarkan satu alternatif melalui penerapan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur dan ras. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut:

a. Pendidikan multikultural secara *inhern* sudah ada sejak bangsa Indonesia ini ada. Falsafah bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, suka gotong royong, membantu, dan menghargai antar satu dengan yang lainnya. Betapa dapat dilihat dalam potret kronologis bangsa ini yang sarat dengan masuknya berbagai suku bangsa asing dan terus berakulturasi dengan masyarakat pribumi. Semua suku itu ternyata secara kultural sudah mampu beradaptasi dengan suku-suku asli negara Indonesia. Misalnya Suku Jawa, Batak, Minang, Bugis, Ambon, Papua, Suku Dayak, dan Suku Sunda. Proses adaptasi dan akulturasi yang berlangsung di antara suku-suku dan etnis yang datang ternyata sebagian besar dilakukan dengan damai tanpa adanya penindasan yang berlebihan. Proses

inilah yang dikenal dengan pendidikan multikultural. Hanya saja model pendidikan multikultural ini semakin tereduksi dengan adanya kolonialisasi di bidang politik, ekonomi, dan mulai merambah ke bidang budaya dan peradaban bangsa.

- b. Pendidikan multikultural memberikan secercah harapan dalam mengatasi berbagai gejolak masyarakat yang terjadi akhir-akhir ini. Pendidikan multikultural, adalah pendidikan yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai, keyakinan, heterogenitas, pluralitas dan keragaman, apapun aspeknya dalam masyarakat. Dengan demikian, pendidikan multikultural tidak menjadikan semua manusia sebagai manusia yang bermodel sama, berkepribadian sama, berintelektual sama, atau bahkan berkepercayaan yang sama pula. Oleh karena itu pendidikan multikultural menjadi sangat penting dan cocok bagi Negara Indonesia.
- c. Pendidikan multikultural menentang pendidikan yang berorientasi bisnis. Pada saat ini, lembaga pendidikan baik sekolah atau perguruan tinggi berlomba-lomba menjadikan lembaga pendidikannya sebagai sebuah institusi yang mampu menghasilkan *income* yang besar. Alasannya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta didik. Padahal semua orang tahu, bahwa pendidikan yang sebenarnya bagi bangsa Indonesia bukanlah pendidikan keterampilan belaka, melainkan pendidikan yang harus

mengakomodir semua jenis kecerdasan.yang sering dikenal dengan nama kecerdasan ganda (*multiple intelligence*).

- d. Pendidikan multikultural sebagai resistensi fanatisme yang mengarah pada berbagai jenis kekerasan. Kekerasan muncul ketika saluran kedamaian sudah tidak ada lagi. Kekerasan tersebut sebagai akibat dari akumulasi berbagai persoalan masyarakat yang tidak diselesaikan secara tuntas dan saling menerima. Ketuntasan penyelesaian berbagai masalah masyarakat adalah prasyarat bagi munculnya kedamaian. Fanatisme yang sempit juga bisa meyebabkan munculnya kekerasan. Fanatisme ini juga berdimensi etnis, bahasa, suku, agama, atau bahkan sistem pemikiran baik di bidang pendidikan, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Pertimbangan-pertimbangan itulah yang perlu dikaji bagi subjek pendidikan di Indonesia. salah satunya dengan mengembangkan model pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang mampu mengakomodir sekian ribu perbedaan dalam sebuah wadah yang harmonis, toleran, dan saling menghargai. Inilah yang diharapkan menjadi salah satu pilar kedamaian, kesejahteraan, kebahagiaan, dan keharmonisan kehidupan masyarakat Indonesia. (Tilaar: 2004: 67).

Dengan demikian Pendidikan multikultural merupakan respon terhadap perkembangan keragaman populasi sekolah, sebagaimana



tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Dalam dimensi lain pendidikan multikultural merupakan pengembangan kurikulum dan aktifitas pendidikan untuk memasuki berbagai pandangan, sejarah, prestasi dan perhatian terhadap orang-orang non eropa. (Ainurrafiq, 2003: 24).

Paradigma pendidikan multikultural dalam konteks ini memberi pelajaran kepada kita untuk memiliki apresiasi respek terhadap budaya dan agama-agama orang lain. Atas dasar ini maka penerapan multikulturalisme menuntut kesadaran dari masing-masing budaya lokal untuk saling mengakui dan menghormati keanekaragaman budaya yang dibalut semangat kerukunan dan perdamaian. Paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu *concern* dari pasal 4 UU No.20 tahun 2003 sistem pendidikan nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Ciri-ciri Pendidikan multikulturalisme menurut H.A.R. Tilaar (2004: 59), adalah:

- a. Tujuannya membentuk manusia budaya dan menciptakan masyarakat berbudaya (berperadaban).
- b. Materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis (kultural).

- c. Metodenya demokratis, yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis (multikulturalis).
- d. Evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya.

Dalam konteks ini dapat dikatakan, tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah untuk menanamkan nilai toleran, respek, sikap atau penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan menghargai perbedaan terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. dan yang terpenting dari strategi pendidikan multikultural ini tidak hanya bertujuan agar siswa mudah memahami pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran mereka agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan demokrasi.

Menurut H.A.R. Tilaar (dalam makalah Zainal Arifin 2009: 7) untuk membangun Pendidikan multikultural di Indonesia membutuhkan beberapa dimensi sebagai berikut :

- a. *Right to Culture* dan identitas budaya lokal.

Multikulturalisme meskipun didorong oleh pengakuan terhadap hak asasi manusia, namun akibat globalisasi pengakuan tersebut diarahkan juga kepada hak-hak yang lain yaitu hak akan kebudayaan (*right to culture*). Pendidikan multikultural di Indonesia haruslah

diarahkan kepada terwujudnya masyarakat madani (*civil society*) di tengah-tengah kekuatan kebudayaan global.

b. *Kebudayaan* Indonesia yang menjadi.

Kebudayaan Indonesia yang menjadi adalah suatu *Weltanschauung* artinya merupakan pegangan setiap insan dan setiap identitas budaya mikro Indonesia. Sebagai suatu *Weltanschauung*, hal tersebut merupakan suatu sistem nilai yang baru (*value system*). Sebagai suatu *value system* yang baru memerlukan suatu proses perwujudannya antara lain melalui proses dalam Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu di tengah-tengah maraknya identitas kesukuan, sekaligus perlu ditekankan sistem nilai baru yang akan kita wujudkan, yaitu sistem nilai keIndonesiaan. Hal tersebut bukannya suatu yang mudah karena memerlukan pergeseran paradigma di dalam proses pendidikan bangsa Indonesia.

Sebagai suatu paradigma baru di dalam Sistem Pendidikan Nasional, maka perlu dirumuskan bagaimana Pendidikan Nasional diarahkan kepada pemeliharaan dan pengembangan konsep negara-bangsa yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan kepada kekayaan kebudayaan dari berbagai suku bangsa di Indonesia.

c. Konsep Pendidikan Multikultural Normatif.

Tujuan Pendidikan multikultural normatif untuk mewujudkan kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh suatu negara-bangsa, tapi

jangan sampai menjadikan konsep pendidikan multikultural normatif sebagai suatu paksaan dengan menghilangkan keanekaragaman budaya-budaya lokal. Pendidikan multikultural normatif justru memperkuat identitas suatu suku yang kemudian dapat menyumbangkan bagi terwujudnya suatu kebudayaan Indonesia yang dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Konsep ini juga dengan sendirinya sesuai dengan tuntutan atas hak asasi manusia dan sekaligus hak untuk mempunyai dan mengembangkan budaya sendiri (*right to culture*)

d. Pendidikan Multikultural Merupakan Suatu Rekonstruksi Sosial.

Suatu rekonstruksi sosial artinya upaya untuk melihat kembali kehidupan sosial yang ada dewasa ini. Salah satu masalah yang timbul akibat berkembangnya rasa kedaerahan, identitas kesukuan, *the right to culture* dari perorangan maupun suatu suku bangsa Indonesia, telah menimbulkan rasa kelompok yang berlebihan dan tidak jarang menyebabkan pergeseran dan tidak jarang menyebabkan pergeseran-pergeseran horizontal yang tidak dikenal sebelumnya.

Rasa kesukuan yang berlebihan dapat melahirkan ketidakharmonisan di dalam kehidupan bangsa yang pluralis. Oleh sebab itu pendidikan multikultural tidak akan mengenal fanatisme atau fundamentalisme sosial-budaya termasuk agama, karena masing-masing komunitas mengenal dan menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Demikian pula di dalam pendidikan

multikultural tidak mengenal adanya *xenophobia*. *Xenophobia* adalah kebencian terhadap barang atau orang asing, ketidaksukaan pada yang serba asing. (kamus digital John Echols & Hasan Sadily).

e. Pendidikan Multikultural di Indonesia Memerlukan Pedagogik Baru.

Untuk melaksanakan konsep pendidikan multikultural di dalam masyarakat pluralis memerlukan pedagogik baru, karena pedagogik tradisional membatasi proses pendidikan di dalam ruang sekolah yang sarat dengan pendidikan intelektualistik. Sedangkan kehidupan sosial-budaya di Indonesia menuntut pendidikan hati (*pedagogy of heart*) yaitu diarahkan kepada rasa persatuan dari bangsa Indonesia yang pluralistik. Pedagogik yang dibutuhkan ialah: 1) Pedagogik pemberdayaan (*pedagogy empowerment*). 2) Pedagogik kesetaraan manusia dalam kebudayaan yang beragam (*pedagogy of equity*). Pedagogik pemberdayaan pertama-tama berarti, seorang mengenal budayanya sendiri dan selanjutnya kebudayaan itu digunakan untuk mengembangkan budaya Indonesia di dalam negara-bangsa Indonesia. Di dalam upaya tersebut diperlukan pedagogik kesetaraan antar-individu, antar suku, dan tidak membedakan asal-usul suku bangsa dan agamanya.

f. Pendidikan multikultural bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika berbangsa.

Dalam TAP/MPR RI Tahun 2001 No. VI dan VII mengenai visi Indonesia masa depan serta etika kehidupan berbangsa perlu

dijadikan pedoman yang sangat berharga dalam mengembangkan konsep Pendidikan multikultural. Dalam kaitan ini perlu dipertimbangkan menghidupkan kembali Pendidikan budi pekerti terutama di tingkat Pendidikan dasar, melengkapi Pendidikan agama yang sudah ditangani dengan UU No. 20 Tahun 2003 (H.A.R. Tilaar, 2004: 185-190)

Jadi dengan memahami dimensi pendidikan multikultural dalam melakukan kegiatan pendidikan akan memposisikan peserta didik sebagai subyek sekaligus obyek pendidikan, yang sesuai dengan ciri peserta didik yaitu berdaya menggunakan kemampuannya dan kemauannya, memiliki keinginan untuk berkembang, memiliki latar belakang sosio-kultur yang berbeda, dan memiliki potensi secara individu.

Indonesia sebagai negara yang plural terdiri dari berbagai suku dan agama membutuhkan sebuah konsep Pendidikan multikultural yang dapat menghasilkan peserta didik yang dapat menghargai perbedaan dan hidup dalam keharmonisan perbedaan. Dimensi tersebut merupakan upaya untuk membangun Pendidikan multikultural di Indonesia.

Menurut H.A.R. Tilaar (dalam Choirul Mahfud 2011: 183), bangsa yang tidak punya strategi untuk mengelola kebudayaan yang mendapat tantangan yang demikian dahsyatnya, dikhawatirkan akan mudah terbawa arus hingga akhirnya kehilangan jati diri lokal dan nasional. Pendidikan multikultural hendaknya dijadikan strategi dalam

mengelola kebudayaan dengan menawarkan strategi transformasi budaya yang ampuh yakni melalui mekanisme Pendidikan yang menghargai perbedaan budaya (*different of culture*).

Menurut Choirul Mahfud (2011: 192) ada beberapa pendekatan dalam proses pendidikan multikultural yaitu:

- a. Tidak lagi terbatas pada menyamakan pandangan pendidikan (*education*) dengan persekolahan (*schooling*) atau pendidikan multikultural dengan program-program sekolah formal. Pandangan yang lebih luas mengenai pendidikan sebagai transmisi kebudayaan membebaskan pendidik dari asumsi bahwa tanggung jawab primer mengembangkan kompetensi kebudayaan di kalangan anak didik semata-mata berada di tangan mereka dan justru semakin banyak pihak yang bertanggung jawab karena program-program sekolah seharusnya terkait dengan pembelajaran informal di luar sekolah.
- b. Menghindari pandangan yang menyamakan kebudayaan dengan kelompok etnik adalah sama. Artinya, tidak perlu lagi mengasosiasikan kebudayaan semata-mata dengan kelompok-kelompok etnik sebagaimana yang terjadi selama ini. Secara tradisional, para pendidik mengasosiasikan kebudayaan hanya dengan kelompok-kelompok sosial yang relatif *self sufficient*, daripada dengan sejumlah orang yang secara terus menerus dan berulang-ulang terlibat satu sama lain dalam satu atau lebih kegiatan. Dalam konteks pendidikan multikultural, pendekatan ini diharapkan

dapat mengilhami para penyusun program pendidikan multikultural untuk melenyapkan kecenderungan memandang anak didik secara *stereotip* (penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan) menurut identitas etnik mereka dan akan meningkatkan eksplorasi pemahaman yang lebih besar mengenai kesamaan dan perbedaan di kalangan anak didik dari berbagai kelompok etnik.

- c. Pengembangan kompetensi dalam suatu kebudayaan baru biasanya membutuhkan interaksi inisiatif dengan orang-orang yang sudah memiliki kompetensi, bahkan dapat dilihat lebih jelas bahwa upaya-upaya untuk mendukung sekolah-sekolah yang terpisah secara etnik adalah antitesis terhadap tujuan pendidikan multikultural. Mempertahankan dan memperluas solidaritas kelompok adalah menghambat sosialisasi ke dalam kebudayaan baru. Pendidikan bagi pluralisme budaya dan pendidikan multikultural tidak dapat disamakan secara logis.
- d. Pendidikan multikultural meningkatkan kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kebudayaan mana yang akan diadopsi ditentukan oleh situasi.
- e. Kemungkinan bahwa pendidikan (baik dalam maupun luar sekolah) meningkatkan kesadaran tentang kompetensi dalam beberapa kebudayaan. Kesadaran seperti ini kemudian akan menjauhkan kita dari konsep dwi budaya atau dikotomi antara pribumi dan non-



pribumi. Dikotomi semacam ini bersifat membatasi individu untuk sepenuhnya mengekspresikan diversitas kebudayaan. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran akan multikulturalisme sebagai pengalaman normal manusia. Kesadaran ini mengandung makna bahwa pendidikan multikultural berpotensi untuk menghindari dikotomi dan mengembangkan apresiasi yang lebih baik melalui kompetensi kebudayaan yang ada pada diri anak didik.

Dalam konteks keIndonesiaan dan kebhinnekaan, kelima pendekatan tersebut haruslah diselaraskan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Masyarakat adalah kumpulan manusia atau individu-individu yang terbagi dalam kelompok sosial dengan suatu tantangan budaya atau tradisi tertentu. Oleh karena itu, dalam melakukan kajian dasar kependidikan terhadap masyarakat. Secara garis besar dasar-dasar yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat tidak ada dengan sendirinya. Masyarakat adalah ekstensi yang hidup, dinamis, dan selalu berkembang.
- b. Masyarakat bergantung pada upaya setiap individu untuk memenuhi kebutuhan melalui hubungan dengan individu lain yang berupaya memenuhi kebutuhan.
- c. Individu-individu, di dalam berinteraksi dan berupaya bersama guna memenuhi kebutuhan, melakukan penataan terhadap upaya tersebut dengan jalan apa yang disebut tantangan sosial.

- d. Setiap masyarakat bertanggung jawab atas pembentukan pola tingkah laku antara individu dan komunitas yang membentuk masyarakat.
- e. Pertumbuhan individu di dalam komunitas, keterikatan dengannya, dan perkembangannya di dalam bingkai yang menuntutnya untuk bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya.

Dari uraian tentang pendidikan multikultural maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendidikan multikultural merupakan sebuah proses pengembangan. Pengembangan adalah sebuah proses yang berusaha meningkatkan sesuatu yang sejak awal atau sebelumnya sudah ada. Pengembangan disini lebih dimaknai sebagai proses, sebab tidak dibatasi oleh ruang, waktu, subjek, objek, dan relasinya. Proses ini bisa dilakukan dimana saja, kapan saja, oleh siapa saja, untuk apa saja, dan berkaitan dengan apa saja. Dengan demikian, pendidikan multikultural tidak mengenal batasan atau sekat-sekat sempit yang sering menjadi tembok total bagi interaksi sesama manusia.
2. Pendidikan multikultural adalah mengembangkan seluruh potensi manusia.

Pendidikan pada dasarnya merupakan proses pengembangan seluruh potensi manusia. Potensi-potensi yang ada sebelumnya atau sejak awal sudah ada dalam diri manusia adalah potensi intelektual, potensi sosial, potensi moral, potensi religius, potensi ekonomi,

potensi teknis, potensi kesopanan, dan tentunya potensi budaya. Potensi-potensi ini diharapkan dapat dikembangkan secara maksimal dan seimbang. Sebagai langkah awalnya adalah ketaatan terhadap nilai-nilai luhur kemanusiaan, penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang, penghargaan terhadap orang-orang yang berbeda baik beda dalam hal ekonomi, aspirasi, politik, ajaran aliran (agama), tradisi etnis, atau beda dalam tradisi budaya.

3. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai pluralitas dan heterogenitas.

Pluralitas dan heterogenitas adalah sebuah keniscayaan ketika berada pada masyarakat sekarang ini. Dewasa ini dikatakan mustahil jika sebuah negara atau wilayah tidak mengalami pluralisasi dan heterogenisasi dalam masyarakatnya. Pluralitas bukan hanya dipahami keragaman etnis atau suku, akan tetapi juga dipahami sebagai keragaman pemikiran, keragaman paradigma, keragaman paham, keragaman kebijakan, keragaman model ekonomi, keragaman aspirasi politik, dan sebagainya. Pluralitas dan heterogenitas dalam arti di atas tidak memberi kesempatan bagi masing-masing pihak untuk mengklaim bahwa kelompok pikiran, kelompok paradigma, atau pengikut sistem ekonomi harus menjadi anutan bagi pihak lainnya. Pemaksaan hasil pemikiran dengan paradigma tertentu tentang sistem ekonomi yang berujung pada aspirasi politik kepada orang atau kelompok lain adalah proses

dominasi dan hegemonisasi. Dominasi dan hegemonisasi pada dasarnya merupakan penyimpangan secara radikal terhadap nilai multikultural.

4. Pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai dan menjunjung tinggi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Penghormatan dan penghargaan bahkan menjunjung tinggi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama adalah sikap yang sangat penting disosialisasikan. Sebab sebagaimana diungkap di atas dewasa ini mustahil sebuah negara hanya terdiri dari satu budaya, etnis, suku, dan satu aliran agama saja.

Dengan melihat realitas keragaman tersebut maka sikap toleransi, respek, penghormatan terhadap HAM, dan menghargai perbedaan adalah sikap yang penting. *Privilage* dan privasi yang hanya memperhatikan kelompok manusia tertentu menjadi sangat tidak relevan. Perlakuan dan penghormatan yang sama harus diaplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi, politik, hukum, agama, dan budaya (Ainurrofiq Dawam, 2003: 101).

Pendidikan multikultural merupakan pendidikan yang menjunjung tinggi dan menghargai perbedaan. Oleh sebab itu, pendidikan multikultural diharapkan memiliki orientasi yang jelas. Hal ini dimaksudkan agar pendidikan multikultural tidak berlawanan arah dengan nilai-nilai multikulturalisme. Sebagaimana diungkapkan oleh

Ainurrofiq Dawam (2003: 104), orientasi yang seharusnya dibangun dan dipertahankan antara lain sebagai berikut:

a. Orientasi kemanusiaan.

Kemanusiaan atau humanisme merupakan sebuah nilai kodrati yang menjadi universal, global, di atas semua suku, aliran, ras, golongan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan hati nurani yang paling dalam. Nurani adalah hakim yang paling jujur, adil, berwawasan, dan tidak berkepentingan apa-apa kecuali kepentingan kemanusiaan itu sendiri.

b. Orientasi kebersamaan.

Kebersamaan merupakan sebuah nilai yang sangat mulia dalam masyarakat yang plural dan heterogen. Kebersamaan yang hakiki akan membawa kepada kedamaian yang tidak ada batasnya. Kebersamaan yang dibangun adalah kebersamaan yang masing-masing pihak merasa tidak merugikan dirinya sendiri, orang lain, lingkungan, dan negaranya. Dengan kebersamaan yang sangat paripurna inilah diharapkan muncul manusia yang aktif, kreatif, toleran, tenggang rasa yang mendalam dan terbuka.

c. Orientasi kesejahteraan.

Kesejahteraan merupakan sebuah kondisi sosial yang menjadi harapan semua orang. Pendidikan multikultural yang berorientasi kesejahteraan bukan berarti terjebak pada pemenuhan kebutuhan materi yang berlebih dan sama banyaknya oleh semua orang.

Melainkan yang menjadi orientasinya adalah bahwa masyarakat secara sadar dan tidak dipaksa mengatakan bahwa diri mereka telah sejahtera.

d. Orientasi proporsional.

Proporsional merupakan sebuah nilai yang dipandang dari aspek apapun adalah sangat tepat. Tepat landasan, tepat proses, tepat pelaku, tepat ruang, tepat waktu, tepat anggaran, tepat kualitatif, tepat kuantitatif, dan tepat tujuan. Ketepatan di sini tidak diartikan sebagai ketepatan yang bersifat *rigid* dalam arti hanya menggunakan salah satu pertimbangan, melainkan ketepatan yang ditinjau dari semua sudut pandang, khususnya yang berkaitan langsung dengan nilai proporsional, sehingga semua pihak dapat menerima dengan baik, lapang dada, dan tidak menimbulkan kasak-kasuk di belakang. Orientasi pendidikan yang demikian inilah yang diharapkan menjadi pilar pendidikan multikultural.

e. Orientasi mengakui pluralitas dan heterogenitas.

Pluralitas dan heterogenitas merupakan sebuah kenyataan yang tidak mungkin ditindas secara fasis dengan memunculkan sikap fanatisme terhadap sebuah kebenaran yang diyakini oleh sekelompok orang. Pemaksaan kehendak untuk menerima pendapat, pemikiran, teori, kebijakan, sistem politik, sistem ekonomi, sistem budaya, sistem pendidikan tidak sesuai dengan pendidikan multikultural.

f. Orientasi anti hegemoni dan anti dominasi.

## 2. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan yang wajib diberikan di semua jenjang Pendidikan. Hal ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan ialah mengembangkan seseorang sebagai warga Negara yang baik (*good citizen*). (Kurikulum Berbasis Kompetensi, 2004).

Secara epistemologis, Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan dalam tradisi *citizenship education* yang tujuannya sesuai dengan tujuan nasional negara. Namun secara umum, tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan, baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab; dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

- 1) Persatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, Keterbukaan dan jaminan keadilan.
- 2) Norma, hukum dan peraturan yang meliputi tertib dalam kehidupan keluarga, tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
- 3) Hak asasi manusia yang meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
- 4) Kebutuhan warga negara yang meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
- 5) Konstitusi negara yang meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, Konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, Hubungan dasar negara dengan konstitusi.
- 6) Kekuasaan dan Politik yang meliputi Pemerintahan desa dan kecamatan, Pemerintahan daerah dan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistem politik, Budaya politik, Budaya demokrasi



menuju masyarakat madani, Sistem pemerintahan, Pers dalam masyarakat demokrasi.

- 7) Pancasila yang meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- 8) Globalisasi meliputi: Globalisasi di lingkungannya, Politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, Dampak globalisasi, Hubungan internasional dan organisasi internasional, dan Mengevaluasi globalisasi (Kurikulum KTSP, 2006).

Berkaitan dengan hal tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam menerapkan nilai-nilai multikulturalisme sebagai salah satu upaya pengembangan masyarakat multikultural. Pemikiran H.A.R. Tilaar toleran, respek, penghormatan terhadap HAM, dan menghargai perbedaan menguatkan tema-tema pendidikan Kewarganegaraan yang diajarkan sejak dahulu. Hal ini diperkuat lagi dengan peraturan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum Pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum Pendidikan Tinggi (Pasal 37).

Ketentuan ini lebih jelas dan diperkuat lagi pada Pasal 37 bagian Penjelasan dari Undang-Undang tersebut bahwa “Pendidikan

Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Pendidikan Kewarganegaraan yang menanamkan nilai-nilai multikultural berperan penting dalam Pendidikan multikultural untuk mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia.

### **3. Pengaruh Pemikiran H.A.R. Tilaar Terhadap Pendidikan Kewarganegaraan**

Menurut H.A.R. Tilaar (2009: 218) ciri utama pendekatan studi kultural dalam Pendidikan multikultural adalah yang disebut lintas batas dari disiplin ilmu pengetahuan (*border crossing*). Dalam mata pelajaran ilmu-ilmu sosial, mata pelajaran bahasa, tujuan yang telah dirumuskan mengenai pendidikan multikultural dapat dicapai tanpa memberikan suatu mata pelajaran tertentu.

Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*) ataupun Pendidikan moral (*moral education*) merupakan wadah untuk menampung program-program Pendidikan multikultural. Berbagai tujuan Pendidikan yang sifatnya cenderung untuk membangun karakter anak didik, agar lebih memiliki watak, sikap dan perilaku yang sesuai nilai-nilai moral dan budaya dibutuhkanlah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan merupakan salah satu media yang paling efektif untuk melahirkan generasi yang memiliki pandangan yang mampu menjadikan keragaman sebagai bagian yang harus diapresiasi secara konstruktif.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu instrumen fundamental dalam bingkai pendidikan nasional sebagai media bagi pembentukan karakter bangsa di tengah heterogenitas yang menjadi karakteristik utama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki ragam perbedaan dan menjadi kekayaan bangsa Indonesia. Perbedaan suku, budaya, adat-istiadat, agama, ras, gender, strata sosial dan golongan politik sangat jelas melekat dalam diri masyarakat Indonesia. Pluralitas menjadi sebuah realita dan mesti diterima sebagai kekayaan nasional bangsa Indonesia.

Di tengah banyak perbedaan tersebut, sebagai suatu kesatuan nasional bangsa Indonesia harus hidup dan bergaul agar integritas nasional tetap terjaga. Implikasi logisnya adalah perlu membangun sikap inklusif, pluralis, toleran dan saling berdampingan dengan cinta dan perdamaian dengan menanamkan nilai-nilai multikulturalisme.

Terkait dengan pendidikan multikultural, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan multikultural di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar (2004: 192), yaitu membina pribadi-pribadi bangsa Indonesia yang mempunyai kebudayaan sukunya masing-masing, memelihara dan mengembangkannya, serta sekaligus

membangun bangsa Indonesia dengan kebudayaan Indonesia sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD 1945.

James A. Banks dikenal sebagai perintis Pendidikan Multikultural. Banks yakin bahwa sebagian dari pendidikan lebih mengarah pada mengajari bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan. Ia menjelaskan bahwa siswa harus diajar memahami semua jenis pengetahuan, aktif mendiskusikan konstruksi pengetahuan (*knowledge construction*) dan interpretasi yang berbeda-beda. Siswa yang baik adalah siswa yang selalu mempelajari semua pengetahuan dan turut serta secara aktif dalam membicarakan konstruksi pengetahuan. Dia juga perlu disadarkan bahwa di dalam pengetahuan yang dia terima itu terdapat beraneka ragam interpretasi yang sangat ditentukan oleh kepentingan masing-masing. Bahkan interpretasi itu nampak bertentangan sesuai dengan sudut pandangnya. Siswa seharusnya diajari juga dalam menginterpretasikan sejarah masa lalu dan dalam pembentukan sejarah (*interpretations of the history of the past and history in the making*) sesuai dengan sudut pandang mereka sendiri. Mereka perlu diajari bahwa mereka sebenarnya memiliki interpretasi sendiri tentang peristiwa masa lalu yang mungkin penafsiran itu berbeda dan bertentangan dengan penafsiran.

Di samping itu, arti penting pendidikan multikultural bagi Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia didasarkan atas pemikiran Banks bahwa pendidikan multikultural adalah cara memandang realitas dan cara berpikir, dan bukan hanya konten tentang beragam kelompok

etnis, ras, dan budaya. Dimensi pendidikan multikultural menurut Banks (Tilaar, 2004: 138), yaitu:

1. *Content integration*, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu.
2. *The knowledge construction process*, membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin)
3. *An equity pedagogy*, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial.
4. *Prejudice reduction*, mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka.
5. *Empowering school culture*, melatih kelompok untuk berpartisipasi, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik.

Pemikiran Banks mengenai pendidikan multikulturalisme lebih menekankan mengenai pentingnya pendidikan multikulturalisme dan penerapan pendidikan multikulturalisme bagi siswa. Hal ini sejalan dengan pemikiran Tilaar yang menyatakan bahwa kebudayaan, pendidikan, dan masyarakat adalah tripatrit tunggal.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai luhur dan moral yang berakar

pada budaya bangsa Indonesia dengan cara menanamkan nilai-nilai multikulturalisme yang diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku kehidupan sehari-hari peserta didik sebagai individu, anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*”. Konfigurasi atau kerangka sistemik Pendidikan Kewarganegaraan dibangun atas dasar paradigma sebagai berikut:

- 1) Pendidikan Kewarganegaraan secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan Pendidikan yang wajib diberikan di semua jenjang Pendidikan termasuk Pendidikan tinggi.
- 2) Pendidikan Kewarganegaraan secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat *konfluen* atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, Kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara.

- 3) Pendidikan Kewarganegaraan secara programatik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (*content embedding values*) dan pengalaman belajar (*learning experiences*) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, ber-bangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, Kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara (Winataputra dan Budimansyah dalam Dasim 2009: 2).

Bangsa Indonesia sendiri memiliki pengalaman yang kaya dalam upaya meng'Indonesia'kan warganya melalui serangkaian pelaksanaan Pendidikan Kewarganegaraan. Pada era reformasi dan demokrasi sekarang ini tentunya dibutuhkan Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan membentuk warga negara yang demokratis, yaitu warga negara yang cerdas, berkeadaban, dan bertanggung jawab bagi kelangsungan Negara Indonesia (Winarno, 2007: v-vi)

Jika memperhatikan uraian tersebut, maka tampak bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan program Pendidikan yang sangat penting sebagai upaya pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan multikultural yang menanamkan nilai-nilai multikulturalisme. Pemikiran H.A.R. Tilaar memperkuat bahwa nilai nilai multikulturalisme yang meliputi toleran, respek, penghormatan terhadap HAM, dan menghargai perbedaan memperkuat Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang

berbasis pendidikan multikultural untuk menanamkan nilai-nilai multikulturalisme, dalam rangka menciptakan karakter anak bangsa yang bisa hidup dalam nuansa perbedaan.

Pendidikan demokrasi yang menjadi bagian dalam konten Pendidikan Kewarganegaraan akan tercapai jika komponen-komponen sosio-kultural Indonesia sebagai bangsa, dipahami sebagai kekayaan alam nusantara. Komponen-komponen sosio-kultural diformulasikan dalam bentuk Pendidikan multikultural yang menerapkan nilai-nilai multikultural. Oleh guru sebagai mediator di kelas, dikonstruksi sebuah pendekatan sederhana tapi penuh makna dalam Pendidikan Kewarganegaraan yaitu berbasis multikultural.

Pendidikan Kewarganegaraan yang sarat dengan nilai-nilai multikulturalisme seperti toleransi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, menghargai perbedaan, yang pada akhirnya diharapkan mampu mewujudkan warga negara yang baik yang mampu mendukung kelangsungan bangsa dan negara. Nilai-nilai yang tercakup dalam pendidikan multikultural dapat mengantarkan individu bersikap toleran, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, dan suka pada perdamaian. Nilai-nilai itu sangat dibutuhkan untuk terciptanya masyarakat madani sebab masyarakat madani memiliki ciri antara lain; universalitas, supremasi hukum, menghargai perbedaan, kebaikan dari dan untuk semua, meraih kebajikan umum, dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.



Pengembangan kompetensi Kewarganegaraan yang bercirikan multikultural menjadi bagian tak terpisahkan dalam upaya pengembangan warga negara multikultural. Kompetensi Kewarganegaraan multikultural adalah seperangkat pengetahuan, nilai, dan sikap, serta keterampilan siswa yang mendukung menjadi warga negara multikultural yang partisipatif dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kompetensi Kewarganegaraan yang dimaksud sebagaimana dikemukakan Branson (1998), yaitu: 1) *Civic knowledge* (pengetahuan Kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara; 2) *Civic skill* (kecakapan Kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara yang relevan; dan 3) *Civic disposition* (watak Kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional (Branson, 1998: 16).

Dalam kerangka membangun warga negara dan masyarakat multikultural Indonesia, setiap warga negara perlu memiliki sejumlah kompetensi Kewarganegaraan yang merupakan modal sosial dan budaya yang didasarkan atas pengetahuan dan pemahaman tentang realitas kebhinnekaan masyarakat Indonesia untuk memunculkan sikap penghargaan dan penghormatan terhadap kebhinnekaan. Kompetensi Kewarganegaraan multikultural ini merupakan budaya Kewarganegaraan (*civic culture*) yang dikemas dalam tiga komponen kompetensi Kewarganegaraan, yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition*.

*Pertama*, dari segi komponen pengetahuan kewarganegaraan multikultural, warga negara perlu memahami seperangkat pengetahuan dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan tema-tema toleransi; tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama; bahaya diskriminasi; penyelesaian konflik dan mediasi; hak asasi manusia; demokrasi dan kebhinnekaan; kemanusiaan universal, politik dan pemerintah; prinsip-prinsip *rule of law*; *separation of power*; *checks and balances*; dan subyek-subyek lain yang relevan.

*Kedua*, dari segi komponen kecakapan kewarganegaraan multikultural, setiap warga negara perlu dibekali dengan kecakapan yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengidentifikasi (menandai/menunjukkan); menggambarkan (memberikan uraian/ ilustrasi); menjelaskan (mengklarifikasi/menafsirkan), menganalisis; mengevaluasi pendapat/posisi (menggunakan kriteria/standar untuk membuat keputusan); mengambil pendapat/posisi; mempertahankan pendapat/posisi terhadap tema-tema toleransi; tema-tema tentang perbedaan ethno-kultural dan agama; bahaya diskriminasi; penyelesaian konflik dan mediasi; hak azasi manusia; demokrasi dan kebhinnekaan; kemanusiaan universal, politik dan pemerintah; prinsip-prinsip *rule of law*; *separation of power*; *checks and balances*; dan subyek-subyek lain yang relevan.

Dari segi kecakapan partisipasi, kewarganegaraan multikultural akan ditandai oleh kemampuan untuk: (1) berinteraksi dalam masyarakat dan kebudayaan yang memiliki latar belakang berbeda dengan masyarakat

dan kebudayaan yang dimilikinya dengan mengedepankan prinsip toleransi, saling menghormati, dan saling menghargai dalam kesederajatan; (2) memantau/ memonitor masalah-masalah publik terutama dalam penanganan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hubungan antara individu (warga negara) dengan sesama individu (warga negara), hubungan antara kelompok sosial yang berbeda, dan antara warga negara dengan negara; dan (3) mempengaruhi proses politik pemerintahan baik secara formal maupun informal untuk menegakan prinsip-prinsip multikulturalisme.

*Ketiga*, dari segi komponen watak kewarganegaraan multikultural, setiap warga negara perlu mengembangkan dan mempraktikkan jalinan kerjasama dengan orang/kelompok dari berbagai latar belakang; berperilaku mengutamakan kepentingan umum dalam konteks publik; mempromosikan hak individu, keanekaragaman dan kesetaraan; menjunjung kebenaran, cinta tanah air; tidak larut dalam pengkultusan tokoh, kelompok dan partai, ras, etnik, bahasa dan agama/keyakinan; mau mengakui kekurangan dan kesalahan, mau belajar dari kekurangan dan kesalahan, tidak mudah dihegemoni dan mudah mencari kambing hitam atau memanipulasi sesuatu yang merugikan orang lain, tidak mudah berprasangka buruk kepada individu atau kelompok lain; dan kritis sesuai konteks ruang dan waktu.

Tiga komponen kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan harus berjalan beriringan dan mampu menjadi modal sosial (*social capital*)

bangsa. Kompetensi kewarganegaraan ini juga berimplikasi pada perlunya interaksi yang bermakna antar anggota kelompok masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda.

Pendidikan Kewarganegaraan yang bermutu dan menerapkan nilai-nilai multikulturalisme memberdayakan seseorang untuk memberi makna yang berarti pada sesuatu yang berwujud seperti bendera, lambang negara, lagu kebangsaan, monument nasional, atau peristiwa politik dan kenegaraan. Pendidikan kewarganegaraan juga memberdayakan seseorang untuk memberi makna pada sesuatu yang tidak berwujud seperti nilai-nilai ideal bangsa, cita-cita dan tujuan negara, hak-hak mayoritas dan minoritas, dan konstitusionalisme.

Kemampuan untuk mengidentifikasi bahasa dan simbol-simbol emosional juga sangat penting bagi seorang warga negara. Mereka harus mampu menangkap dengan jelas maksud-maksud hakiki dari bahasa dan simbol-simbol emosional yang digunakan. Kecakapan intelektual lain yang dipupuk oleh Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanamkan nilai-nilai multikulturalisme adalah kemampuan mendeskripsikan. Melihat dengan jelas dan mendeskripsikan kecenderungan seperti berpartisipasi dalam kehidupan Kewarganegaraan, imigrasi, atau pekerjaan, membantu warga negara untuk selalu menyesuaikan diri dengan peristiwa-peristiwa yang sedang aktual dalam pola jangka waktu yang lama.

Pendidikan Kewarganegaraan yang menanamkan nilai-nilai multikulturalisme berusaha mengembangkan kompetensi dalam

menjelaskan dan menganalisis. Warga negara juga perlu memiliki kemampuan untuk menganalisis hal-hal tertentu sebagai komponen-komponen dan konsekuensi cita-cita, proses-proses sosial, ekonomi, atau politik, dan lembaga-lembaga. Kemampuan dalam menganalisis ini akan memungkinkan seseorang untuk membedakan antara fakta dengan opini atau antara cara dengan tujuan. Hal ini juga membantu warga negara dalam mengklarifikasi berbagai macam tanggung jawab seperti misalnya antara tanggung jawab publik dan privat, atau antara tanggung jawab para pejabat .

Indonesia adalah sebuah masyarakat multikultural yang bukan hanya dimaksudkan pada keanekaragaman suku bangsa semata tetapi juga keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Masyarakat multikultural Indonesia perlu mengetahui penyebaran dan pemahaman konsep serta urgensi multikulturalisme bagi bangsa Indonesia yang multikultural melalui sebuah Pendidikan multikultural yang menanamkan nilai-nilai multikulturalisme dan dikembangkan baik dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan dan masyarakat multikultural memiliki hubungan timbal balik yang kuat, bila pada satu sisi Pendidikan memiliki peran signifikan guna membangun masyarakat multikultural, di sisi lain masyarakat multikultural dengan segala karakternya memiliki potensi signifikan untuk mensukseskan fungsi dan peran Pendidikan. Penguatan di satu sisi, langsung atau tidak langsung, akan memberi penguatan pada sisi lain.

Indonesia sebagai negara majemuk baik dalam segi agama, suku bangsa, golongan maupun budaya lokal perlu menyusun konsep pendidikan multikultural sehingga menjadi pegangan untuk memperkuat identitas nasional, Pendidikan Kewarganegaraan yang telah diajarkan kepada siswa dan disempurnakan dengan memasukan pendidikan multikultural, seperti budaya lokal antar daerah kedalamnya, agar generasi muda bangga sebagai bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Dengan demikian, nilai-nilai multikultural dalam pendidikan multikultural adalah pendidikan nilai yang harus ditanamkan pada siswa sebagai calon warga negara, agar memiliki persepsi dan sikap multikulturalistik, bisa hidup berdampingan dalam keragaman watak kultur, agama dan bahasa, menghormati hak setiap warga negara tanpa membedakan etnik mayoritas atau minoritas, dan dapat bersama-sama membangun kekuatan bangsa sehingga diperhitungkan dalam percaturan global dan *nation dignity* yang kuat.

Pengembangan dan penerapan Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis pendidikan multikultural serta menerapkan nilai-nilai multikulturalisme di Indonesia dapat berfungsi sebagai sarana alternatif pemecahan konflik sosial, pembinaan warga negara agar tidak tercerabut dari akar budayanya, sebagai landasan pengembangan kurikulum Pendidikan nasional, dan untuk membangun kewarganegaraan multikultural bagi terciptanya masyarakat multikultural Indonesia.

Implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural, akan membantu siswa mengerti, menerima dan menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya dan nilai kepribadian. Melalui penanaman semangat multikulturalisme di sekolah-sekolah, akan menjadi medium pelatihan dan penyadaran bagi generasi muda untuk menerima perbedaan budaya, agama, ras, etnis dan kebutuhan di antara sesama dan mau hidup bersama secara damai. Agar proses ini berjalan sesuai harapan, maka seyogyanya kita mau menerima jika pendidikan multikultural disosialisasikan dan didiseminasikan melalui lembaga pendidikan, serta, jika mungkin, ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum pendidikan di berbagai jenjang baik di lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta. Apalagi, paradigma multikultural secara implisit juga menjadi salah satu *concern* dari Pasal 4 UU NO. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal itu dijelaskan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi HAM, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa.

Indonesia sebagai negara majemuk baik dalam segi agama, suku bangsa, golongan maupun budaya lokal perlu menyusun konsep pendidikan multikultural sehingga menjadi pegangan untuk memperkuat identitas nasional, Mata pelajaran Kewarganegaraan dan Agama yang telah diajarkan di sekolah dasar hingga perguruan tinggi, disempurnakan dengan memasukan pendidikan multikultural, seperti budaya lokal antar daerah ke dalamnya, agar generasi muda bangga

sebagai bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat meningkatkan rasa nasionalisme. Dengan demikian, pendidikan multikultur adalah pendidikan nilai yang harus ditanamkan pada siswa sebagai calon warga negara, agar memiliki persepsi dan sikap multikulturalistik, bisa hidup berdampingan dalam keragaman watak kultur, agama dan bahasa, menghormati hak setiap warga negara tanpa membedakan etnik mayoritas atau minoritas, dan dapat bersama-sama membangun kekuatan bangsa sehingga diperhitungkan dalam percaturan global dan *nation dignity* yang kuat.

Menurut Hamid Hasan (2000), bahwa masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki keragaman sosial, budaya, aspirasi politik dan kemampuan ekonomi. Keragaman tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum, kemampuan sekolah dalam menyediakan pengalaman belajar dan kemampuan siswa dalam berproses, belajar dan mengolah informasi menjadi sesuatu yang dapat diterjemahkan sebagai hasil belajar. Keragaman itu menjadi suatu variabel bebas yang memiliki kontribusi sangat signifikan terhadap keberhasilan kurikulum, baik sebagai proses maupun sebagai hasil.

Oleh karena itu, pengembangan kurikulum dengan menggunakan pendekatan pengembangan multikultural harus didasarkan pada empat prinsip. *Pertama*, keragaman budaya menjadi dasar dalam menentukan filsafat. *Kedua*, keragaman budaya dijadikan dasar dalam



mengembangkan berbagai komponen kurikulum, seperti tujuan, konten, proses, dan evaluasi. *Ketiga*, budaya dilingkungan unit pendidikan dari mulai pendidikan tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi sehingga sumber belajar dan objek studi harus dijadikan bagian dari kegiatan belajar siswa. *Keempat*, kurikulum berperan sebagai media dalam mengembangkan kebudayaan daerah dan nasional.

Implementasi pendidikan multikultur pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dapat dilakukan melalui pendidikan Kewarganegaraan, dapat dilakukan melalui pemberdayaan kurikulum atau penambahan atau perluasan kompetensi hasil belajar dalam konteks pembinaan akhlak dan budi pekerti, memiliki intensitas untuk membina dan mengembangkan kerukunan hidup antar umat beragama, dengan memberi penekanan pada nilai-nilai toleran, respek, penghormatan terhadap HAM, dan menghargai perbedaan dalam pemikiran H.A.R Tilaar. Kemudian, juga harus dilakukan dalam pendekatan deduktif dengan kajian yang relevan, kemudian dikembangkan menjadi norma-norma keagamaan, norma hukum, etik, maupun norma sosial kemasyarakatan.

Pendidikan multikultur melalui pendidikan Kewarganegaraan dimulai dari design perencanaan dan kurikulum melalui proses penyisipan, pengayaan dan atau penguatan terhadap berbagai kompetensi yang telah ada, mendesign proses pembelajaran yang bisa mengembangkan sikap siswa untuk bisa menghormati hak-hak orang lain, tanpa

membedakan latar belakang ras, agama, bahasa dan budaya. Dan terakhir pendidikan hasil dan pencapaian pendidikan multikultur harus dapat diukur melalui evaluasi yang relevan, apakah melalui instrumen tes, non-tes atau melalui proses pengamatan longitudinal dengan menggunakan portofolio siswa.

Sesuai dengan kompetensi standar tersebut, maka dapat dikembangkan beberapa kompetensi dasar sebagai berikut:

1. Menjadi warga negara yang menerima dan menghargai perbedaan-perbedaan etnik, agama, bahasa dan budaya dalam struktur masyarakatnya.
2. Menjadi warga negara yang bisa melakukan kerjasama multi etnik, multi kultur, dan multi religi dalam konteks pengembangan ekonomi dan kekuatan bangsa.
3. Menjadi warga negara yang mampu menghormati hak-hak individu warga negara tanpa membedakan latar belakang etnik, agama, bahasa dan budaya dalam semua sektor sosial, pendidikan, ekonomi, politik dan lainnya, bahkan untuk memelihara bahasa dan mengembangkan budaya mereka.
4. Menjadi warga negara yang memberi peluang pada semua warga negara untuk terwakili gagasan dan aspirasinya dalam lembaga-lembaga pemerintahan, baik legislatif maupun eksekutif.
5. Menjadi warga negara yang mampu mengembangkan sikap adil dan mengembangkan rasa keadilan terhadap semua warga negara

tanpa membedakan latar belakang etnik, agama, bahasa dan budaya mereka.

Dengan kompetensi-kompetensi dasar tersebut, maka pembelajaran multikultur diharapkan akan menghasilkan warga negara yang memiliki sikap dan kebiasaan multikultur dengan sikap dan perilaku yang toleran antar semua anak bangsa, solider dan bisa saling bekerjasama untuk kepentingan bangsa, bersikap egaliter, memiliki sikap empati sesama warga, dan bersikap adil dengan tidak membedakan latar belakang agama, ras, bahasa dan warna kulit.

Agar pendidikan multikultur ini dapat menghasilkan *output* atau lulusan yang tidak hanya kompeten sesuai dengan disiplin ilmu yang ada pada setiap institusi pendidikan ataupun yang ditekuninya, tetapi *output* tersebut juga mampu menerapkan nilai-nilai keberagaman dalam memahami dan menghargai keberadaan perbedaan yang ada maka penanaman nilai-nilai ini tidak hanya dilakukan pada mata pelajaran Kewarganegaraan dan Agama saja tapi dapat pula berintegrasi dengan mata pelajaran lain. Dimana penanaman nilai multikultur ini bisa dilakukan oleh seorang guru atau pendidik baik dalam pembelajaran di kelas atau dalam kegiatan sehari-hari.

Dengan demikian pendidikan multikultur harus direncanakan dalam sebuah design pengembangan kurikulum yang integratif, sequentif dan didukung dengan lingkungan serta struktur dan budaya yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan sikap dan perilaku

multikultur. Pendidikan multikultur, secara substantif harus bisa menjadi bagian integral baik dalam mata pelajaran Pendidikan. Tema-tema multikultur harus disajikan dalam skope yang komprehensif sebagai upaya pencapaian berbagai kompetensi yang telah disepakati dan ditetapkan.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pendidikan multikultural dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, Pendidikan Kewarganegaraan merupakan nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum Pendidikan dasar dan menengah pada mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi (pasal 37). Ketentuan ini lebih jelas dan diperkuat lagi pada pasal 37 bagian penjelasan dari Undang-undang tersebut bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan adanya ketentuan UU tersebut maka kedudukan pendidikan Kewarganegaraan sebagai basis pengembangan masyarakat multikultural dalam sistem pendidikan di Indonesia semakin jelas mantap. Hal ini menunjukkan bahwa konsep dan konstruksi keberagaman memiliki tempat strategis dalam Pendidikan Kewarganegaraan yaitu dalam kompetensi dasar Pendidikan Kewarganegaraan yang harus dikuasai oleh peserta didik.

Terkait dengan Pendidikan multikultural, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang memiliki komitmen kuat dan

konsisten untuk mempertahankan NKRI yang mengakui keberagaman dalam harmoni.

Tanpa penanaman nilai-nilai multikulturalisme dalam Pendidikan Kewarganegaraan, keragaman yang ada akan menjadi menjadi sumber konflik. Oleh sebab itu, konsep keberagaman yang ada dalam pendidikan multikulturalisme sangat penting untuk diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai dengan tujuan nasional negara. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizenship*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan, baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab; dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Hal ini berarti bahwa konsep keberagaman sangat penting diajarkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Penanaman nilai-nilai multikulturalisme dalam Pendidikan Kewarganegaraan akan menjadikan siswa memiliki sikap sebagai warga negara yang baik sesuai dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap terjaga.

Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan multikultural di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar (2004: 192) yaitu membina pribadi-pribadi bangsa Indonesia yang mempunyai kebudayaan sukunya masing-masing, memelihara dan mengembangkannya, serta

sekaligus membangun bangsa Indonesia dengan kebudayaan Indonesia sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pemikiran H.A.R. Tilaar mengenai toleransi, respek, penghormatan terhadap HAM, dan menghargai perbedaan menguatkan nilai-nilai yang diajarkan dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Pemikiran H.A.R. Tilaar menjelaskan arti penting penanaman nilai-nilai toleransi, respek, penghormatan terhadap HAM, dan menghargai perbedaan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam budaya atau multikultur.